

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI ACEH

Naila Ariqah Putri¹

nailaar2003@gmail.com

Fakriah²

Rasyidusman Hannamara Furqan Nur³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Locally-Generated Revenue and Capital Expenditure on the financial performance of local governments in Aceh Province. A quantitative approach was employed using secondary data sourced from Budget Realization Reports and Statistics Indonesia (BPS). Analysis was conducted using panel data regression, comparing the Common Effect Model, Fixed Effect Model, and Random Effect Model, with model selection determined through Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests. The results indicate that Locally-Generated Revenue has a positive and significant effect on financial performance. Capital Expenditure shows a positive relationship but does not have a significant effect. Collectively, Locally-Generated Revenue and Capital Expenditure significantly influence financial performance. These findings highlight the importance of strengthening local revenue capacity and improving the quality of capital expenditure allocation to ensure local financial management becomes increasingly autonomous, effective, and sustainable.

Keywords: *Locally-Generated Revenue, Capital Expenditure, Local Government Financial Performance, Panel Data Regression.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan data Badan Pusat Statistik. Analisis dilakukan melalui regresi data panel dengan membandingkan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model serta pemilihan model menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan. Belanja Modal mempunyai hubungan positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan. Secara bersama-sama, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pengalokasian belanja modal agar pengelolaan keuangan daerah semakin mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Regresi Data Panel.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting karena keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan mengelola pendapatan dan belanja secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Kinerja keuangan pemerintah daerah karena itu menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu perbandingan Pendapatan Asli Daerah

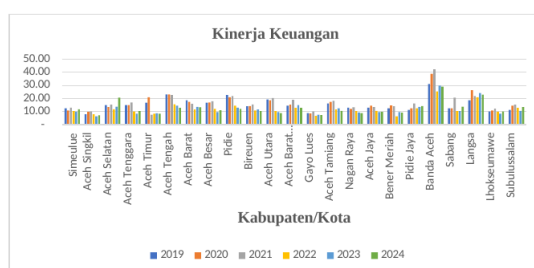
dengan pendapatan transfer. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan pemerintahannya tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah, semakin kuat kemandirian fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Optimalisasi PAD menjadi penting karena peningkatan PAD dapat memperluas ruang fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Halim menegaskan bahwa kontribusi PAD yang semakin besar terhadap

pendapatan daerah mencerminkan kemandirian keuangan yang semakin baik.

Selain PAD, Belanja Modal merupakan faktor yang secara teoritis dapat berkaitan dengan kinerja keuangan karena diarahkan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja tersebut antara lain berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

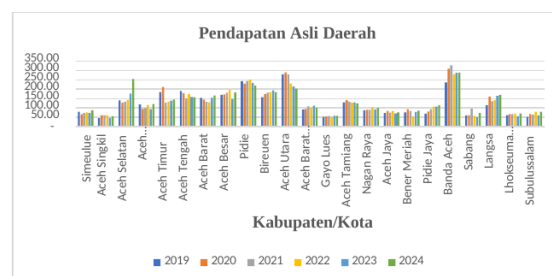
Provinsi Aceh memiliki karakteristik fiskal yang khas, termasuk adanya Dana Otonomi Khusus. Namun, ketergantungan sebagian kabupaten/kota terhadap transfer pemerintah pusat masih relatif tinggi. Kondisi tersebut menjadikan kemampuan menggali PAD dan kualitas pengalokasian Belanja Modal relevan untuk dikaji.



Grafik 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh
Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh; direproduksi dari grafik pada tugas akhir.

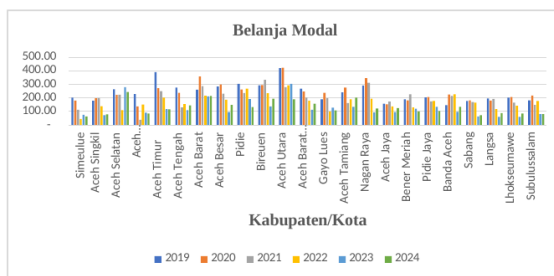
Grafik menunjukkan adanya perbedaan tingkat kinerja keuangan antar kabupaten/kota. Banda Aceh tampak mempunyai tingkat kinerja relatif paling tinggi, sedangkan beberapa daerah memiliki tingkat kinerja yang lebih rendah. Variasi tersebut menggambarkan perbedaan kapasitas fiskal dan kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola sumber penerimaannya.

Perbedaan kemampuan fiskal juga terlihat pada perkembangan Pendapatan Asli Daerah. Aktivitas ekonomi, pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata membuat beberapa daerah mempunyai basis PAD yang lebih kuat. Sebaliknya, daerah dengan aktivitas ekonomi dan basis penerimaan yang lebih terbatas cenderung lebih bergantung pada transfer pemerintah pusat.



Grafik 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh; direproduksi dari grafik pada tugas akhir.

Grafik memperlihatkan variasi PAD yang cukup besar antar daerah. Banda Aceh berada pada kelompok dengan PAD relatif tinggi, sementara sejumlah daerah lain berada pada tingkat yang lebih rendah. Fenomena tersebut memperkuat argumentasi bahwa kapasitas PAD berpotensi berkaitan dengan kinerja keuangan melalui peningkatan kemandirian fiskal.



Grafik 3. Belanja Modal
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
 Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh;
 direproduksi dari grafik pada tugas
 akhir.

Belanja Modal juga menunjukkan fluktuasi dan perbedaan antar daerah. Aceh Utara tercatat sebagai salah satu daerah dengan alokasi Belanja Modal relatif tinggi pada sebagian besar periode. Namun, tingginya Belanja Modal belum selalu diikuti kinerja keuangan yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena manfaat aset bersifat jangka panjang, terdapat biaya pemeliharaan, atau sumber pembiayaan

belanja masih banyak berasal dari dana transfer.

Kesenjangan hasil penelitian terdahulu juga menjadi alasan penting penelitian ini. Sejumlah penelitian menemukan PAD berpengaruh positif dan signifikan, sementara pengaruh Belanja Modal berbeda-beda, mulai dari negatif signifikan, positif tidak signifikan, hingga tidak berpengaruh. Penelitian ini memfokuskan objek pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan periode pengamatan yang digunakan dalam tugas akhir, sehingga memberikan bukti empiris pada konteks fiskal Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai ketentuan. Penilaian kinerja diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD dan melihat kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan rasio kemandirian sebagai ukuran kinerja keuangan. Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan daerah

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kriteria rasio kemandirian dalam sumber penelitian dibedakan menjadi tingkat tinggi, sedang, rendah, dan rendah sekali. Semakin besar rasio, semakin tinggi kemampuan daerah membiayai kebutuhan pemerintahan dari sumber sendiri.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam penelitian, PAD diproksikan dengan total PAD kabupaten/kota dan ditransformasikan ke bentuk logaritma natural dalam estimasi regresi.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Penerimaan pajak berkontribusi terhadap pembiayaan pemerintahan, pembangunan

infrastruktur, dan pelayanan publik. Dalam konteks daerah, pajak daerah mencakup jenis pajak yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan atas pelayanan atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Sumber penelitian membedakan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Komponen ini berasal dari pengelolaan kekayaan atau penyertaan modal daerah, antara lain bagian laba atau dividen dari badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah serta hasil investasi daerah.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Komponen ini mencakup penerimaan lain yang sah di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, seperti jasa giro, bunga, hasil penjualan aset tertentu, tuntutan ganti kerugian, komisi, dan denda.

3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal diarahkan untuk mendukung fungsi pemerintahan dan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana.

- Belanja tanah: pengeluaran untuk memperoleh tanah yang digunakan dalam operasional dan pembangunan pemerintah daerah.
- Belanja peralatan dan mesin: pengadaan kendaraan dinas, perangkat elektronik, perlengkapan kantor, dan peralatan lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Belanja gedung dan bangunan: pembangunan atau perolehan gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas publik.
- Belanja jalan, irigasi, dan jaringan: pembangunan serta pengadaan infrastruktur jalan, saluran irigasi, dan jaringan yang dikuasai pemerintah daerah.
- Belanja aset tetap lainnya: pengadaan aset tetap di luar kategori sebelumnya, seperti

koleksi perpustakaan, museum, atau alat kesenian dan kebudayaan

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif yang menganalisis pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Objek penelitian terdiri atas dua puluh tiga pemerintah daerah dengan periode pengamatan enam tahun sehingga terbentuk seratus tiga puluh delapan observasi panel yang seimbang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran dan publikasi Badan Pusat Statistik Aceh. Data yang digunakan meliputi PAD, Belanja Modal, dan kinerja keuangan yang diukur melalui rasio kemandirian. Data panel menggabungkan dimensi cross-section berupa kabupaten/kota dan dimensi time series berupa periode pengamatan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu melalui buku, artikel ilmiah, dan jurnal. Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dokumen keuangan dan publikasi resmi pemerintah serta Badan Pusat Statistik.

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran karakteristik data melalui

mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, serta statistik pendukung lainnya. Analisis ini membantu melihat variasi data sebelum dilakukan estimasi model panel. Selanjutnya data yang dilakukan analisis dengan regresi data panel digunakan karena penelitian menggabungkan data beberapa pemerintah daerah dengan pengamatan lintas waktu. Tiga pendekatan yang diestimasi adalah Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model.

CEM merupakan pendekatan paling sederhana yang mengasumsikan intersep dan koefisien regresi sama untuk seluruh cross-section dan waktu. Model ini tidak memasukkan perbedaan karakteristik individual daerah. FEM mengakomodasi perbedaan karakteristik khusus setiap kabupaten/kota melalui intersep yang berbeda. Perbedaan individual dianggap tetap selama periode penelitian. REM memperlakukan perbedaan karakteristik kabupaten/kota sebagai efek acak yang masuk ke komponen error. Pendekatan ini efisien apabila efek individual tidak berkorelasi dengan variabel independen.

Pemilihan model dilakukan secara berurutan melalui uji Chow, uji

Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Uji Chow membandingkan CEM dan FEM. Uji Hausman membandingkan FEM dan REM. Uji LM membandingkan CEM dan REM.

Setelah pengujian terpilih model akhir adalah *Random Effect Models* (REM), pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian meliputi uji normalitas dan multikolinearitas. Normalitas diuji dengan Jarque-Bera, sedangkan multikolinearitas dinilai melalui *centered Variance Inflation Factor*. Nilai probabilitas Jarque-Bera yang lebih besar dari tingkat signifikansi menunjukkan residual berdistribusi normal, sedangkan *centered VIF* di bawah batas sepuluh menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas.

Model empiris yang digunakan dapat dituliskan sebagai:

$$KK_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LnPAD}_{it} + \beta_2 \text{LnBM}_{it} + e_{it}$$

Keterangan: KK adalah kinerja keuangan pemerintah daerah; α adalah konstanta; β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi; LnPAD adalah logaritma natural Pendapatan Asli Daerah; LnBM adalah logaritma natural Belanja Modal; dan e adalah error.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap kinerja keuangan. Keputusan didasarkan pada probabilitas atau perbandingan nilai t hitung dengan t tabel. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi, variabel dinyatakan berpengaruh signifikan.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah PAD dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Model dinyatakan signifikan apabila probabilitas F lebih kecil dari tingkat signifikansi.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui proporsi variasi kinerja keuangan yang dapat dijelaskan oleh PAD dan Belanja Modal. Semakin besar R -squared, semakin besar kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian terdiri atas dua puluh tiga kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data panel bersifat balanced karena setiap pemerintah daerah diamati pada setiap periode penelitian. Analisis dilakukan menggunakan EViews tiga belas.

2. Statistik Deskriptif

Statistik	KK	LnPAD	LnBM
Mean	92,76416	25,46217	25,85232

Median	92,57792	25,46500	25,93000
Maximum	98,88000	26,62000	26,77000
Minimum	89,77000	24,54000	24,40000
Std. Dev.	1,704896	0,508177	0,462944
Jarque-Bera	15,37468	5,484920	8,209130
Probability	0,000459	0,064412	0,016497
Observations	138	138	138

Kinerja keuangan mempunyai rata-rata sebesar 92,76416 dengan standar deviasi 1,704896. PAD mempunyai rata-rata 25,46217 pada bentuk logaritma natural, sedangkan Belanja Modal mempunyai rata-rata 25,85232. Nilai minimum dan maksimum menunjukkan adanya variasi antar kabupaten/kota.

3. Common Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60,45649	8,352044	7,238527	0,0000
LNPA D	1,570152	0,283274	5,542880	0,0000
LNBM	-0,296755	0,310951	-0,954347	0,3416

CEM menunjukkan PAD berhubungan positif dan signifikan, sedangkan Belanja Modal berhubungan negatif tetapi tidak signifikan. CEM memiliki R-squared 0,195021 dan probabilitas F 0,000000.

4. Fixed Effect Model

Varia bel	Coeffic ient	Std. Error	t- Statis tic	Pro b.
C	64,6794 5	21,11 539	3,063 142	0,00 27
LNP AD	0,90748 3	0,801 263	1,132 565	0,25 98
LNB M	0,19256 4	0,299 119	0,643 772	0,52 10

FEM menunjukkan PAD dan Belanja Modal berhubungan positif dan tidak signifikan. FEM memiliki R-squared FEM 0,530059 dan probabilitas F 0,000000.

5. Random Effect Model

Variab el	Coefficie nt	Std. Error	t- Statist ic	Prob .
C	57,10686	10,579 38	5,3979 40	0,000 0
LNPA D	1,375360	0,3829 72	3,5912 85	0,000 5
LNBM	0,024664	0,2857 20	0,0863 24	0,931 3

REM menunjukkan PAD berhubungan positif dan signifikan, sedangkan Belanja Modal berhubungan positif tetapi tidak signifikan. REM memiliki R-squared REM 0,592716 dan probabilitas F 0,001405.

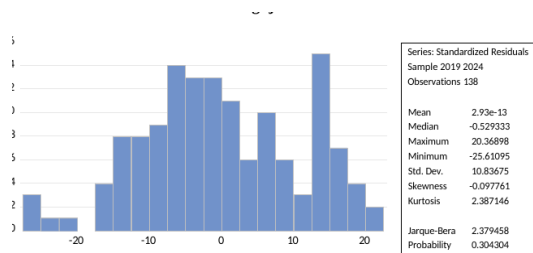
6. Pemilihan Model Data Panel

Penguji an	Statisti k	Probabilit as	Kesimpul an
Chow - Cross- section F	3,66190 5	0,0000	FEM
Chow - Chi- square	74,2729 24	0,0000	FEM
Hausma n - Chi- square	4,30931 3	0,1159	REM
LM - Cross- section	27,0567 7	0,0000	REM
LM - Time	0,01269 4	0,9103	Tidak ada efek waktu
LM - Both	27,0694 6	0,0000	REM

Uji Chow menunjukkan FEM lebih tepat dibanding CEM karena probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi. Uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,1159 sehingga REM dipilih dibanding FEM. Uji LM menghasilkan probabilitas cross-section 0,0000 sehingga REM lebih tepat

dibanding CEM. Dengan demikian, REM digunakan sebagai model akhir.

7. Uji Asumsi Klasik



umber : Hasil olah data dengan E-Views 13.0

Grafik 4. Hasil Uji Normalitas Residual

Sumber: Hasil olah data dengan EViews tiga belas.

Uji normalitas menghasilkan Jarque-Bera sebesar 2,379458 dengan probabilitas 0,304304. Karena probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, residual dinyatakan berdistribusi normal.

8. Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
LNPAD	1,195624
LNBM	1,195624

Centered VIF kedua variabel sebesar 1,195624 dan berada jauh di bawah batas sepuluh. Dengan demikian, model tidak menunjukkan masalah multikolinearitas.

9. Model Random Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	57,10686	10,57938	5,397940	0,0000
LNPA D	1,375360	0,382972	3,591285	0,0005
LNBM	0,024664	0,285720	0,086324	0,9313

Sumber: Hasil olah data dengan EViews tiga belas.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah $KK = 57,10686 + 1,375360 \text{ LnPAD} + 0,024664 \text{ LnBM}$. Konstanta menunjukkan nilai kinerja keuangan ketika PAD dan Belanja Modal dianggap konstan. Koefisien PAD positif menunjukkan bahwa peningkatan PAD berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan. Koefisien Belanja Modal juga positif, tetapi tidak signifikan.

10. Efek Individu Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Konstanta (C)	Cross-section Effect	Perhitungan Intersep	Nilai Intersep
1	Aceh Barat	57,10686	1,220081	$57,10686 + 1,220081$	58,32694
2	Aceh Barat Daya	57,10686	0,280610	$57,10686 + 0,280610$	57,38747
3	Aceh	57,10686	-0,55430	$57,10686 - 0,55430$	56,55256

	Besar	6	1	-	
				0,554301	
4	Aceh Jaya	57,1068 6	-0,10207 7	57,10686 -	57,00478
				0,102077	
5	Aceh Selatan	57,1068 6	-0,68172 5	57,10686 -	56,42514
				0,681725	
6	Aceh Singkil	57,1068 6	-0,14071 9	57,10686 -	56,96614
				0,140719	
7	Aceh Tamia ng	57,1068 6	0,324498	57,10686 +	57,43136
				0,324498	
8	Aceh Tengah	57,1068 6	0,834819	57,10686 +	57,94168
				0,834819	
9	Aceh Tenggara	57,1068 6	0,03148	57,10686 +	57,13834
				0,031480	
10	Aceh Timur	57,1068 6	0,711461	57,10686 +	57,81832
				0,711461	
11	Aceh Utara	57,1068 6	-1,08599 2	57,10686 -	56,02087
				1,085992	
12	Banda Aceh	57,1068 6	1,410898	57,10686 +	58,51776
				1,410898	
13	Bener Meriah	57,1068 6	-0,29759 0	57,10686 -	56,80927
				0,297590	
14	Bireun	57,1068 6	-1,26739 5	57,10686 -	55,83947
				1,267395	
15	GayoL ues	57,1068 6	-0,67579 6	57,10686 -	56,43106
				0,675796	
16	Langsa	57,1068 6	0,999957	57,10686 +	58,10682
				0,999957	

17	Lhokse umawe	57,1068 6	-0,27129 1	57,10686 -	56,83557
				0,271291	
18	Nagan Raya	57,1068 6	-0,33755 3	57,10686 -	56,76931
				0,337553	
19	Pidie	57,1068 6	0,974871	57,10686 +	58,081731
				0,974871	
20	Pidie Jaya	57,1068 6	0,88602	57,10686 +	57,99288
				0,88602	
21	Saban g	57,1068 6	0,321108	57,10686 +	57,427968
				0,321108	
22	Simeul ue	57,1068 6	-0,11378 8	57,10686 -	56,99307
				0,113788	
23	Kota Lhokse umawe	57,1068 6	0,279584	57,10686 +	57,38644
				0,279584	

Efek individu menunjukkan adanya karakteristik khusus antardaerah yang tidak seluruhnya dapat dijelaskan oleh PAD dan Belanja Modal. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi, kualitas pengelolaan keuangan, jumlah penduduk, dan faktor kelembagaan.

11. Uji Parsial

Hipotesis	t hitung	t tabel	Prob.	Keputusan
PAD → Kinerja	3,591	1,656	0,0005	Signifikan ; H1 diterima

Belanja Modal → Kinerja	0,086	1,65 6	0,931 3	Tidak signifikan ; H2 ditolak
-------------------------------	-------	-----------	------------	----------------------------------

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel dan probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi. Sebaliknya, Belanja Modal mempunyai koefisien positif tetapi probabilitas jauh lebih besar dari tingkat signifikansi sehingga pengaruhnya tidak signifikan.

12. Uji Simultan

Statistik	Nilai
F-statistic	6,897875
Prob(F-statistic)	0,001405
F tabel	3,063

Nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dan probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi. Dengan demikian, PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

13. Koefisien Determinasi

Indikator	Nilai
R-squared	0,592716
Adjusted R-squared	0,479275
S.E. of regression	1,297848
Durbin-Watson	1,771493

R-squared sebesar 0,592716 menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal mampu menjelaskan 59,27 persen variasi kinerja keuangan. Sisanya sebesar 40,73 persen dijelaskan faktor lain di luar model, seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, efektivitas pengelolaan keuangan, opini audit, dan faktor lainnya.

14. Pembahasan Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan

Hasil REM menunjukkan PAD memiliki koefisien positif sebesar 1,375360 dan probabilitas 0,0005. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara substantif, kemampuan daerah menggali pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, dan sumber PAD lain memperbesar kapasitas pembiayaan yang berasal dari sumber sendiri. Kondisi ini memperkuat kemandirian fiskal karena daerah tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Temuan tersebut sejalan dengan kerangka teori kemandirian keuangan daerah yang menempatkan PAD sebagai sumber penting pembiayaan daerah. Hasil penelitian juga konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap kinerja

keuangan. Perbedaan karakteristik ekonomi antar daerah Aceh membuat kekuatan PAD menjadi salah satu faktor penting dalam menjelaskan variasi kinerja.

15. Pembahasan Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Belanja Modal memiliki koefisien positif sebesar 0,024664, tetapi probabilitas 0,9313 menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan. Artinya, peningkatan nominal Belanja Modal belum secara langsung meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian. Belanja Modal berorientasi pada pembentukan aset dan manfaat jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap kemampuan fiskal tidak selalu muncul pada periode yang sama.

Hasil ini dapat dijelaskan melalui beberapa kemungkinan yang juga dibahas dalam tugas akhir, yaitu manfaat aset yang tidak langsung dirasakan, pemanfaatan aset yang belum optimal, adanya biaya pemeliharaan, dan sumber pembiayaan Belanja Modal yang masih berasal dari dana transfer. Oleh karena itu, besarnya Belanja Modal tidak otomatis mencerminkan meningkatnya kemampuan keuangan yang bersumber dari daerah sendiri.

16. Pengaruh PAD dan Belanja Modal Secara Simultan

Secara simultan, PAD dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan daerah dan kebijakan belanja perlu dipandang secara bersama. PAD memperkuat kapasitas pendanaan mandiri, sedangkan Belanja Modal menyediakan aset dan infrastruktur yang dapat mendukung pelayanan publik. Kinerja keuangan merupakan hasil interaksi antara kemampuan memperoleh pendapatan dan kemampuan mengalokasikan sumber daya secara produktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Peningkatan PAD berkaitan dengan peningkatan kemandirian fiskal.
- Belanja Modal berhubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Peningkatan Belanja Modal belum mampu memberikan dampak langsung terhadap rasio kemandirian.

- Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Saran

- Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan PAD melalui efektivitas pemungutan pajak dan retribusi serta pengelolaan aset daerah.
- Belanja Modal perlu diarahkan pada proyek yang memberikan manfaat pelayanan dan ekonomi jangka panjang, disertai evaluasi pemanfaatan aset.
- Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, opini audit, dana transfer, ukuran pemerintah daerah, atau efektivitas pengelolaan keuangan.
- Penelitian berikutnya dapat memperluas periode pengamatan dan objek agar daya jelaskan model lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

Agustin. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. *Ilmiah Pendidikan Akuntansi*.

Antari, N. P. G. S., dan Sukma, S. I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110.

Ardhini. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan.

Dwigantara dan Handayani. (2021). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Intervening. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.

Febrianty, N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kendali Akuntansi*.

Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., dan Porter, D. C. (2021). *Basic Econometrics*. Edisi keenam.

Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat.

Istiza. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal ETAP*.

- Leki, Y., Naukoko, A. T., dan S. J. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164–174.
- Mustanda. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*.
- Nuzana, M. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(10), 1–22.
- Padang, N. N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 9(2), 303–318.
- Putri Vidia Utami, P. B. H. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Jatama*, 1(3), 1–12.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 81.
- Remanta Oby, R. P. R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen*, 5, 457–465.
- Rustiyani, N. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(2), 250–266.
- Saputra, A. D., dan Kurniawati, L. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Indonesian Journal of Digital Business*.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.